

Belanja Modal- Butuh Perhatian Pemkab, 2 Desa di Sinjai Butuh Jembatan untuk Akses Sekolah dan Kantor Pemerintah



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/06/14/butuh-perhatian-pemkab-2-des-a-di-sinjai-butuh-jembatan-untuk-akses-sekolah-dan-kantor-pemerintah>

Puluhan tahun warga Dusun Tonasa, [Desa Songing](#) dan Desa Polewali, Kecamatan [Sinjai Selatan](#), Kabupaten [Sinjai](#), Sulawesi Selatan melewati jembatan bambu.

Warga di dua desa itu harus menantang maut.

Mereka harus menyebrangi sungai yang memisahkan dua desa itu.

Warga harus menantang maut dengan melewati jembatan bambu.

Kondisi yang sangat membahayakan itu sering terjadi saat hujan lebat tiba dan banjir.

" Sudah puluhan tahun warga di dua desa itu melewati jembatan bambu," kata Muh Ilyas, [guru](#) di MTs Muhammadiyah Songing, Jumat (14/6/2024).

Karena tidak ada jembatan permanen, sehingga masyarakat setempat harus membangun jembatan yang terbuat dari bambu.

Jembatan itu menggunakan pengikat tali dan bahan kawat tembaga.

Sudah tak terhitung berapa kali jembatan bambu itu rubuh.

Tahun 2022 lalu, masyarakat bersama masyarakat setempat membangun jembatan dari batang pohon kelapa.

Setelah banjir di sungai tersebut jembatan yang di bangun anggota TNI hanyut terbawa air banjir.

Tak hanya masyarakat biasa yang melintasi jembatan bambu itu.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Tapi juga ada [guru](#), murid sekolah dasar, siswi MTs dan siswa Madrasah Aliyah.

Hampir setiap tahun diusulkan oleh tokoh masyarakat setempat dalam kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan.

Puluhan tahun warga Dusun Tonasa, [Desa Songing](#) dan Desa Polewali, Kecamatan [Sinjai](#) Selatan, Kabupaten [Sinjai](#), Sulawesi Selatan melewati jembatan bambu.

Warga di dua desa itu harus menantang maut.

Mereka harus menyebrangi sungai yang memisahkan dua desa itu.

Warga harus menantang maut dengan melewati jembatan bambu.

Kondisi yang sangat membahayakan itu sering terjadi saat hujan lebat tiba dan banjir.

" Sudah puluhan tahun warga di dua desa itu melewati jembatan bambu," kata Muh Ilyas, [guru](#) di MTs Muhammadiyah Songing, Jumat (14/6/2024).

Karena tidak ada jembatan permanen, sehingga masyarakat setempat harus membangun jembatan yang terbuat dari bambu.

Jembatan itu menggunakan pengikat tali dan bahan kawat tembaga.

Sudah tak terhitung berapa kali jembatan bambu itu rubuh.

Tahun 2022 lalu, masyarakat bersama masyarakat setempat membangun jembatan dari batang pohon kelapa.

Setelah banjir di sungai tersebut jembatan yang di bangun anggota TNI hanyut terbawa air banjir.

Tak hanya masyarakat biasa yang melintasi jembatan bambu itu.

Tapi juga ada [guru](#), murid sekolah dasar, siswi MTs dan siswa Madrasah Aliyah.

Hampir setiap tahun diusulkan oleh tokoh masyarakat setempat dalam kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/14/butuh-perhatian-pemkab-2-desa-di-sinjai-butuh-jembatan-untuk-akses-sekolah-dan-kantor-pemerintah>
2. <https://sulse.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.

- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.